

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pangantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Asofa, Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Halim, Aridwan, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Handyaningrat, Soewarno, 1980, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Gunung Agung, Jakarta
- H.R., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of documentation and studies of business law, Yogyakarta
- Pound, Roscoe, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction To the Philosophy of Law)*, Terjemahan Mohammad Rajab, Jakarta,
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Sumur Bandung, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- S.P., Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Sujamto, 1993, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sulihandari, Hartanti Dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tedjosaputra, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris, dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

B. Karya Ilmiah

- Paramita, Yuana Rizka, “Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengawasi Tugas dan Jabatan Notaris Di Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017
- Santoso, Regi, “Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengawasi Buku Daftar Akta (*Repertorium*) Notaris Di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018
- Afifah, Kunni, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, Volume 2, Nomor 1, 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja,
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran
Majelis Pengawas Notaris, Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1048

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Majelis Pengawas Notaris

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <https://kbbi.web.id/>